



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN
SUB UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DEDI NURSYAMSI**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **105743**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.522.000.000**

1. Tanah Seluas 560 m2 di TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000
2. Tanah Seluas 246 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 246.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/45 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/200 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
5. Tanah Seluas 198 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
6. Tanah Seluas 180 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 690.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. MOBIL, HONDA SUV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	28.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	200.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	829.186.660
F. HARTA LAINNYA	Rp.	50.000.000
Sub Total	Rp.	3.319.186.660
III. HUTANG	Rp.	511.600.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.807.586.660

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **5 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.